

## ANALISIS FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Junizar<sup>1\*</sup>, Bambang Sujaha<sup>2</sup>, M. Ihsan Dacholfany<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Metro, Indonesia  
E-mail: junizarbkd@gmail.com<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu salah satu caranya melalui rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Pegawai dapat pula dikatakan sebagai salah satu aset dalam suatu organisasi yang menjadi perencana dan sekaligus pelaku dalam aktivitas organisasi. Untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang maksimal maka kebutuhan pegawai negeri sipil harus sesuai dengan tugas dan beban kerja yang ada. Jika jumlah pegawai lebih dari beban kerja yang ada maka akan terjadi inflasi, begitu juga sebaliknya jika jumlah pegawai kurang dari beban kerja maka tidak akan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lampung Tengah. Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik dengan memperoleh data dari hasil wawancara serta observasi secara langsung sehingga memperoleh data–data perhitungan yang akurat. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah masih membutuhkan pegawai sebanyak 45 orang dari jumlah pegawai yang ada yaitu 55 orang dengan jumlah beban kerja sebesar 7.093.440 menit dalam setahun. Oleh karena itu, sebaiknya BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah melakukan peninjauan kembali terhadap Analisis Beban Kerja dengan kebutuhan pegawai sehingga ada kesesuaian antara beban kerja dengan jumlah pegawai.

**Kata Kunci:** *formasi kebutuhan pegawai; analisis jabatan; analisis beban kerja*

### PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) adalah perusahaan atau pekerjaan yang sebenarnya disediakan untuk melakukan proses manufaktur. Dengan kata lain, sumber daya manusia adalah kualitas bisnis seseorang selama periode waktu tertentu untuk memberikan layanan (Sonny Sumarsono 2003).

Didalam sebuah perusahaan SDM merupakan hal utama yang terpenting, karena tanpa adanya sumber daya manusia maka organisasi tidak akan mencapai tujuannya secara maksimal.

Untuk memiliki kinerja yang baik dan dapat diandalkan serta berkualitas kerja petugas pengembangan SDM perlu dilakukan oleh lembaga atau perusahaan sehingga mampu membentuk karakter pegawai yang baik dari budaya kerja yang diterapkan.

Untuk memiliki kinerja pegawai yang berkualitas dengan cara perekrutan pegawai. Perekrutan calon pegawai dilakukan untuk menyaring para calon tenaga kerja, dengan manajemen sumber daya manusia melalui proses mencari, menemukan dan menarik sumber daya manusia untuk dipekerjakan pada suatu organisasi. Pegawai dapat pula dikatakan sebagai salah satu aset dalam suatu organisasi yang menjadi perencana dan sekaligus pelaku dalam aktivitas organisasi dengan memiliki kemampuan berpikir, perasaan, ambisi, serta latar belakang usia, pendidikan, jenis kelamin yang heterogen akan sangat berpengaruh pada jalannya perusahaan.

Dalam hal perencanaan pengadaan PNS, perlu dilaksanakan dengan dasar kebutuhan pegawai, baik kuantitas maupun kualitas serta kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

Salah satu rekrutmen tenaga kerja yaitu penerimaan calon PNS. Lowongan formasi pada suatu

instansi pemerintah dikarenakan adanya PNS yang memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mutasi ke lain instansi.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah instansi pemerintahan yang dibentuk setelah otonomi daerah tahun 1999 yang saat ini berubah nama menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum otonomi daerah diterapkan, semua urusan kepegawaian di pemerintah pusat, sedangkan di daerah hanya sebagai pelaksanaan administrasi kepegawaian dari kebijakan pemerintah pusat. Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah merupakan lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang kepegawaian dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga kabupaten (desentralisasi) dibidang kepegawaian daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah saat ini memiliki pegawai sebanyak 55 PNS dan 36 honorer.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah\*)

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	
		PNS	Honorer
1	Sekretariat dan fungsional	16	19
2	Bidang Pengadaan dan Mutasi	9	4
3	Bidang Pengembangan SDM	8	5
4	Bidang Pembinaan dan Pensiun Pegawai	13	4
5	Bidang Informasi Kepegawaian	9	4
Jumlah Keseluruhan		55	36

Sumber : BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah, 2020.

### *Tujuan Penelitian*

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah beban kerja pegawai dimasing-masing bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan pegawai dimasing-masing bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sukmadinata (2006), menjelaskan penelitian deskriptif adalah “suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia”.

Menurut Punaji Setyosari (2010), menjelaskan bahwa Penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata”.

Menurut Hidayat syah (2010), Penelitian deskriptif adalah “Metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang sekuas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu”.

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

#### *Tempat Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.

#### *Metode Penelitian*

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

#### *Teknik Pengumpulan Data*

Teknologi pengumpulan data adalah teknologi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan peneliti dan kemudian mencatatnya sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yakni usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada informan yang dipilih dengan mengadakan tanya jawab, dialog ataupun diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang akan dilakukan.
2. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang teliti.
3. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dari telaah pustaka.

#### *Sumber Data*

1. Data primer data yang didapatkan langsung dengan byek yang akan diteliti.
2. Data sekunder data yang di dapatkan berdasarkan literatur dari buku dan dan perpustakaan.

#### *Teknik Analisis Data*

Yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahap dalam teknis analisi data, adapun sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui peneliti melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara langsung dengan obyej yang diteliti, serta mengamati langsung temoat yang diteliti, agar data yang digunakan akurat.
2. Reduksi data yaitu penyaringan data informasi agar lebih ringkas ataupun lebih mudah dipahami dalam penelitian.
3. Penyajian data.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan formulir Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 12 Tahun 2011 yang diberikan kepada seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.

Beban kerja Kepala BKPSDM dalam satu tahun sebesar 89.760 menit, dan jumlah keseluruhan dari Bagian Sekretariat sebesar 2.037.900 menit. Jumlah pegawai yang ada pada bagian Sekretariat BKPSDM sebanyak 17 orang. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, bahwa Bagian Sekretariat BKPSDM membutuhkan pegawai sebanyak 37 orang, dengan demikian Bagian Sekretariat

kekurangan pegawai sebanyak 20 orang.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja pada Bagian Sekretariat BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Jabatan	Beban Kerja Jabatan*
1	Kepala Badan	89,760
2	Sekretaris Badan	94,200
3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	78,000
4	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	89,340
5	Pengelola Barang	89,100
6	Pengelola Kepegawaian	79,980
7	Pranata Sarana dan Prasarana Diklat	84,960
8	Pengadministrasi Umum	74,220
9	Pengemudi	80,100
10	Pramu Kebersihan	130,380
11	Petugas Keamanan	167,940
12	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	74,220
13	Kepala Sub Bagian Keuangan	93,840
14	Penata Laporan Keuangan	89,340
15	Bendahara	140,940
16	Pengolah Data Laporan Keuangan	97,260
17	Pengelola Gaji	64,080
18	Pengadministrasi Keuangan	81,420
19	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	92,400
20	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	89,340
21	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	75,660
22	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	81,420
23	Analisis Kepegawaian Pertama	154,176
24	Analisis Kepegawaian Muda	244,176
25	Analisis Kepegawaian Madya	94,176
26	Widyaiswara Pertama	172,176
27	Widyaiswara Muda	172,176
28	Widyaiswara Madya	172,176
	Jumlah	2,037,900
	*) Dalam Menit	

Hasil Analisis Beban Kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi BKPSDM dalam satu tahun sebesar 1.512.600 menit. Jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pengadaan dan Mutasi sebanyak 13 orang. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, bahwa pada Bidang Pengadaan dan Mutasi membutuhkan pegawai sebanyak 19 orang.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja pada Bidang Pengadaan dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Jabatan	Beban Kerja Jabatan*
1	<b>Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi</b>	95,400
2	<b>Kepala Sub Bidang Pengadaan Mutasi Pegawai</b>	87,600
3	Penyusun Rencana Mutasi	82,860
4	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	79,440
5	Pranata Kearsipan	83,460
6	Pengadministrasi Kepegawaian	155,580
7	<b>Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian</b>	79,440
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	82,140
9	Pengelola Data	160,620
10	Pengadministrasi Kepegawaian	155,580
11	Pengadministrasi Umum	139,020
12	<b>Kepala Sub Bidang Kompetensi Aparatur</b>	65,040
13	Analisis Fasilitas Peningkatan Kompetensi	82,140
14	Pengolah Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa	82,860
15	Pengadministrasi Tugas Belajar / Ijin Belajar	81,420
	<b>Jumlah</b>	<b>1,512,600</b>
	*) Dalam Menit	

Selanjutnya, untuk hasil perhitungan Analisis Beban Kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam satu tahun sebesar 1.223.520 menit. Jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 9 orang. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, bahwa pada Bidang Pengadaan dan Mutasi membutuhkan pegawai sebanyak 15 orang.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Beban Kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Jabatan	Beban Kerja Jabatan *
1	<b>Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	99,600
2	<b>Kepala Sub Bidang Promosi Jabatan</b>	106,800
3	Analisis Jabatan	82,140
4	Penyusun Rencana Promosi	90,060
5	Pengelola Data	74,220
6	Pengadministrasi Umum	67,020
7	<b>Kepala Sub Bidang Diklat Penjurangan</b>	74,400
8	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	82,140
9	Analisis Diklat	82,140
10	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	74,220
11	Pengadministrasi Pelatihan	74,220
12	<b>Kepala Sub Bidang Diklat Fungsional Dan Teknis</b>	92,400
13	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur	75,720
14	Pengelola Data	74,220
15	Pengadministrasi Pelatihan	74,220
	<b>Jumlah</b>	<b>1,223,520</b>
	*) Dalam Menit	

Hasil perhitungan Analisis Beban Kerja pada Bidang Pembinaan dan Pensiun dalam satu tahun sebesar 1.250.880 menit. Jumlah pegawai yang ada pada Bidang Pembinaan dan Pensiun sebanyak 9 orang. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, bahwa pada Bidang Pembinaan dan Pensiun membutuhkan pegawai sebanyak 15 orang.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisa Beban Kerja pada Bidang Pembinaan dan Pensiun BPKSDM Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Jabatan	Beban Kerja Jabatan*
1	2	3
1	<b>Kepala Bidang Pembinaan dan Pensiun</b>	93,900
2	<b>Kepala Sub Bidang Fasilitas ASN</b>	106,800
3	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	82,140
4	Pengelola Data	74,220
5	Pengadministrasi Umum	67,020
6	<b>Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun Pegawai</b>	106,800
7	Analisis Pembayaran Program Pensiun	82,140
8	Pengelola Data	74,220
9	Pengadministrasi Umum	146,220
10	<b>Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Penghargaan</b>	103,200
	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	82,140
11		82,140
12	Analisis Penganugerahan	82,140
13	Pengelola Disiplin Pegawai	75,720
14	Pengadministrasi Umum	74,220
	<b>Jumlah</b>	<b>1,250,880</b>
	*) Dalam Menit	

Hasil perhitungan Analisis Beban Kerja pada Bidang Informasi Kepegawaian dalam satu tahun sebesar 1.068.540 menit. Jumlah pegawai yang ada pada Bidang Informasi Kepegawaian sebanyak 7 orang. Berdasarkan hasil analisis beban kerja, bahwa pada Bidang Informasi Kepegawaian membutuhkan pegawai sebanyak 14 orang.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Analisa Beban Kerja pada Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Jabatan	Beban Kerja Jabatan*
1	<b>Kepala Bidang Informasi Kepegawaian</b>	99,600
2	<b>Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian</b>	78,000
3	Analisis Informasi	82,140
4	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	74,220
5	Pengadministrasi Umum	67,020
6	<b>Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur</b>	81,600
7	Analisis Kinerja	82,140
8	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	74,220
9	Pengadministrasi Umum	67,020
10	<b>Kepala Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian</b>	94,200
11	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	59,220
12	Pengelola Dokumentasi	74,220
13	Pranata Kearsipan	60,720
14	Pengadministrasi Umum	74,220
	<b>Jumlah</b>	<b>1,068,540</b>
	*) Dalam menit	

Tabel 7. Jumlah Kebutuhan Pegawai BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah

Nama SKPD	Jumlah Beban Kerja *	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai yang ada	+ / -
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.093.440	100	55	- 45

\*) dalam menit

## KESIMPULAN

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampung Tengah, Badan Kepegawaian Daerah bergabung dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan, menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lampung Tengah, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengendalikan serta mengkoordinasikan terlaksananya pada poksi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pegawai.

Analisis Jabatan pada BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah dibuat berdasarkan formulir analisis jabatan yang sudah ada. Analisis Beban Kerja pada BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah dibuat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 dengan total Beban Kerja sebesar 7.093.440 menit dalam satu tahun. Adapun rinciannya terdiri dari Bagian Sekretariat sebesar 2.037.900 menit per tahun, Bidang Pengadaan dan Mutasi sebesar 1.512.600 menit per tahun, Bidang Pengembangan SDM sebesar 1.223.520 menit per tahun, Bidang Pembinaan dan Pensiun sebesar 1.250.880 menit pertahun, dan Bidang Informasi Kepegawaian sebesar 1.068.540 menit per tahun.

Untuk menentukan kebutuhan pegawai pada pada BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah dilihat dari analisis jabatan dan hasil perhitungan beban kerja pada setiap jabatan yang ada di sub bidang masing-masing, baik jabatan struktural/pejabat ataupun jabatan pelaksana baik fungsional umum ataupun fungsional tertentu.

Jumlah seluruh pegawai pada BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah saat ini berjumlah 55 orang, namun sesuai dengan perhitungan Analisis Beban Kerja bahwa BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah membutuhkan pegawai sebanyak 100 orang, sehingga Bagian Sekretariat masih membutuhkan pegawai sebanyak 20 orang. Bidang Pengadaan dan Mutasi membutuhkan pegawai sebanyak 19 orang dengan ketersediaan pegawai sebanyak 13 orang, dengan demikian terjadi kekurangan pada Bidang Pengadaan dan Mutasi sebanyak 6 orang pegawai. Selanjutnya pada Bidang Pengembangan SDM kebutuhan pegawai berdasarkan ABK sebanyak 15 orang, sementara pegawai yang ada sebanyak 9 orang, sehingga kekurangan 7 orang pegawai dan kelebihan 1 orang pegawai. Jabatan tersebut terjadi terhadap jabatan Analisis Diklat, dimana hasil ABK bahwa Jabatan Analisis Diklat dibutuhkan sebanyak 1 orang, namun yang tersedia sebanyak 2 orang. Selanjutnya untuk Bidang Pembinaan dan Pensiun, dibutuhkan sebanyak 15 orang, pegawai yang ada sebanyak 9 orang, sehingga dibutuhkan 6 orang pegawai untuk memenuhi kebutuhannya. Bidang Informasi Kepegawaian dengan ketersediaan pegawai sebanyak 7 orang, sementara hasil ABK dibutuhkan sebanyak 14 orang pegawai, maka kekurangan sebanyak 7 orang pegawai.

Analisis Beban Kerja pada BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah dibuat sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 dengan total Beban Kerja sebesar 7.093.440 menit dalam satu tahun. Jumlah seluruh pegawai pada BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah saat ini berjumlah 55 orang, namun sesuai dengan perhitungan Analisis Beban Kerja bahwa BKPSDM Kabupaten Lampung Tengah membutuhkan pegawai sebanyak 100 orang, sehingga kekurangan pegawai sebanyak 45 orang.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan rekomendasi bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah sebaiknya melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara Analisis Beban Kerja dengan kebutuhan pegawai khususnya untuk jabatan Analisis Diklat dan untuk setiap jabatan lainnya secara umum.

Jabatan Analisis Diklat sebaiknya dipindahkan ke dalam jabatan Analisis Pengembangan

Sumber Daya Manusia Aparatur dikarenakan jabatan Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia masih kosong. Klasifikasi jabatan yang dibutuhkan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kepegawaian Negara. (2020). Materi presentasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Maret 2020.
- Flippo, Edwin B. (1988). *Personnel Management*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, S. (2010). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.
- Manullang, M. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang hari kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.
- Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Badan Kepegawaian Daerah bergabung dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan, menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lampung Tengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatab di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.
- Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
- Punaji, Setyosari. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta Kencana.
- Sonny Sumarsono. (2003). <https://www.linovhr.com/sumber-daya-manusia-menurut-para-ahli/>
- Subekhi, Akhmad. (2012). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sukmadinata. (2006). *Pengertian deskriptif menurut para ahli.html*. Diakses 14 Januari 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.